

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Proses dan eksistensi pendidikan, dalam hal ini pendidikan yang dilaksanakan melalui lembaga pendidikan formal atau yang lebih terkenal dengan sebutan sekolah, selalu berbanding lurus dengan kondisi dan situasi sosial masyarakat. Suryadi dan Budimansyah (2009: 206) menguraikan bahwa di negara-negara maju, prestasi belajar akademis lebih banyak diterangkan oleh faktor-faktor luar sekolah, dibandingkan dengan sekolah itu sendiri. Sedangkan di negara-negara yang sedang berkembang prestasi belajar akademis lebih banyak diterangkan oleh faktor sekolah (guru, buku paket, alat belajar, manajemen sekolah dan sebagainya) daripada oleh faktor luar sekolah.

Situasi dan kondisi kehidupan sosial dan pendidikan masyarakat Indonesia, mayoritas menunjukkan pada model masyarakat yang lebih menumpukan harapan prestasi belajar akademis pada lembaga pendidikan persekolahan.

Dan atas dasar pertimbangan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan yang merupakan hak asasi setiap individu, negara Indonesia sejak awal kemerdekaannya telah menyatakan visinya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan dalam proses upaya mencerdaskan kehidupan bangsa tersebut, reformasi dalam bidang pendidikan terus dilakukan, terutama oleh pihak pemerintah.

Untuk membenahi pendidikan, antara lain setelah era otonomi daerah mulai tahun 2001 diberlakukan, maka dengan sendirinya model penyelenggaraan pendidikan persekolahan dalam beberapa hal juga berubah dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Pada tahun 2003 diwujudkan Undang-undang nomor 20 tahun 2003 sebagai undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru. Kemudian Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan harus dijadikan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia beserta sejumlah peraturan yang melengkapinya.

Pada saat upaya reformasi dalam bidang pendidikan persekolahan sedang berproses, juga muncul kekhawatiran bahwa lembaga pendidikan persekolahan di Indonesia saat ini nampaknya sedang mengalami masa pancaroba yang sangat hebat, pada satu sisi sekolah dituntut untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan menerapkan berbagai kebijakan pemerintah, pada sisi lain kualitas tenaga pendidikan masih membutuhkan perbaikan yang serius, pada kondisi bersamaan pengaruh dunia luar terhadap tatanan kehidupan masyarakat menerpa begitu dahsyat. Lembaga pendidikan persekolahan harus melakukan reformasi untuk keluar dari anomali. Tekad untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam berbagai dimensinya harus mampu dijawab oleh persekolahan. Karakter dan jati diri manusia Indonesia harus dapat dibina melalui pendidikan persekolahan.

Selama ini pendidikan Indonesia dinilai kurang berhasil dalam menerapkan paradigma pendidikan, Tilaar mencatat sejumlah permasalahan

pendidikan di Indonesia yaitu; *pertama*, sistem pendidikan yang kaku dan sentralistik, *kedua*, sistem pendidikan tidak pernah mempertimbangkan kenyataan yang ada dimasyarakat, *ketiga*, kedua sistem tersebut (sentralistik dan tidak adanya pemberdayaan masyarakat) ditunjang oleh sistem birokrasi yang kaku yang tidak jarang dijadikan alat kekuasaan atau alat politik penguasa. Birokrasi model seperti ini menjadi lahan subur tumbuhnya budaya KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) dan melemahnya dan bahkan hilangnya budaya menghargai prestasi dan profesionalisme. Serta rendahnya anggaran pembiayaan pendidikan. Faktor-faktor tersebut di atas yang menjadi ciri pendidikan di Indonesia dan telah menyebabkan kegagalan pendidikan nasional.

Problem yang cukup akut terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan terjadi hampir pada setiap satuan pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, bahwa dilembaga persekolahan juga terjadi budaya korupsi, dan pemungutan biaya tidak resmi dari orang tua siswa (Irawan: 2006).

Selain yang telah disebutkan di atas, Qadri Aziziy (2003: 8-12), menguraikan problem pendidikan yang lainnya adalah, *pertama*, terbelenggunya guru dan dijadikannya guru sebagai bagian dari alat birokrasi. *Kedua*, pendidikan yang ada kurang berorientasi pada pembentukan kepribadian, namun lebih pada pengisian otak (kognitif) anak didik. Itulah penyebabnya etika, budi pekerti, atau akhlak anak didik tidak pernah menjadi perhatian atau ukuran utama dalam kehidupan baik dalam maupun diluar sekolah. *Ketiga*, peserta didik kurang dibiasakan untuk kreatif dan inovatif serta berorientasi pada keinginan untuk tahu

(*curiosity* atau *hirsh*). Kurangnya perhatian terhadap aspek ini menyebabkan anak hanya dipaksa menghafal dan menerima apa-apa yang dipraktekkan dan disampaikan guru.

Keprihatinan terhadap pendidikan dipersekolahan yang terjadi di Indonesia, nampaknya telah memberikan motivasi kepada sebagian orang untuk memberikan kritikan terhadap dunia pendidikan. Dari sejumlah karya yang telah dipublikasikan berkaitan dengan kritikan terhadap pendidikan dan pembelajaran di sekolah dapat disebutkan beberapa karya anak bangsa berikut ini.

Refleksi kritis terhadap persekolahan dan sistemnya, telah dikemukakan oleh beberapa putra bangsa ini, sebut saja nama Sujono Samba, (2007), menulis buku dengan judul *Lebih Baik Tidak Sekolah*; Yusran Pora (2007), judul bukunya, *Selamat Tinggal Sekolah*; M. Nurdin (2005), judul karyanya, *Pendidikan Yang Menyebabkan*; M. Joko Susilo, (2007), juga mengumpulkan kritikan terhadap pendidikan yang dimuat dalam koran-koran yang terbit di Indonesia, memberi judul karyanya, *Pembodohan Siswa Tersistematis*. Eko Prasetyo, menulis buku *Orang Miskin Dilarang Sekolah!*. Mutrofin menulis, *Otokritik Pendidikan*, dan tentu mungkin masih banyak karya yang ingin memperbaiki wajah pendidikan Indonesia yang belum ditemukan.

Walaupun dapat diketahui bahwa “mazhab pendidikan kritis” yang mulai tumbuh dan bermunculan di Indonesia adalah bagian dari bentuk globalisasi pemikiran dalam bidang pendidikan, karena pengaruh pemikiran dari sejumlah tokoh, misalnya pemikiran Ivan Illich, *Deschooling Society*; Antonio Gramsci;

tentang hegemoni dan pendidikan; Paulo Frrire, tentang konsep pendidikan yang membebaskan, dan pemikiran kritis yang lainnya.

Mengadopsi pemikiran pendidikan kritis di Indonesia, dewasa ini nampaknya telah melahirkan konsep anti-tesis peran serta masyarakat terhadap pendidikan persekolahan, sebagai contoh dapat dilihat maraknya konsep dan aksi pendidikan dalam bentuk *homeschooling*, atau pendidikan sekolah yang berstandar internasional (SBI). Pemikiran pendidikan kritis di Indonesia merupakan upaya untuk memanfaatkan peluang dan mengatasi tantangan pembangunan pendidikan.

Peluang dan tantangan pembangunan pendidikan Indonesia di era global secara bersamaan terbuka lebar. Peluang pembangunan pendidikan yang dapat dimanfaatkan saat ini, menurut Djohar (2006: 12), Undang-undang Sisdiknas yang baru, serta sejumlah kebijakan pendukungnya, termasuk penetapan Standar Nasional Pendidikan (SNP) berdasar Peraturan Pemerintah (PP) nomor: 19 tahun 2005 dan, Wajib Belajar Sembilan Tahun (PP nomor: 47 tahun 2008). Penerapan teori penyelenggaraan pendidikan yang alternatifnya saat ini cukup banyak, seperti isu *school based management*, *broad based management*, *community based education* dan lain-lainnya, teori-teori tersebut berpeluang besar untuk dapat diterapkan dalam dunia pendidikan Indonesia. Adanya pendampingan dan komite sekolah. Pelembagaan pendidikan yang relatif demokratis. Peluang pembangunan pendidikan sebagaimana yang disebutkan di atas, diikuti dengan sejumlah tantangan, yaitu: pemahaman masyarakat yang salah terhadap pendidikan; pembaruan pendidikan yang belum menyentuh praksis pendidikan; sistem

pembaruan yang tidak terarah; praksis pendidikan yang belum memberdayakan pendidikan.

Soedijarto, dalam Hamied, (2008: 36-52), mengemukakan penilaiannya terhadap visi dan misi penyelenggaraan sistem pendidikan nasional. Dapat dipahami dari pandangannya tentang visi dan misi penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, bahwa pendidikan di Indonesia belum berperan secara maksimal dalam membangun pemahaman negara bangsa di era globalisasi. Perlu mencari format pendidikan nasional yang relevan berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional. Upaya ini secara maksimal menurut Soedijarto, dapat dilakukan oleh pendidikan persekolahan. Oleh karena itu sekolah harus dapat merubah paradigmanya, karena menurutnya sekolah saat ini belum maksimal dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional. Ia menyebutkan:

Ini berarti hanya melalui sekolah, yang berfungsi sebagai pusat kebudayaan, kita dapat mewujudkan sistem pendidikan nasional yang berfungsi mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kebudayaan nasional. Walaupun sudah ada ketetapan MPR RI tahun 1999 dan UU No. 20 tahun 2003 (pasal 4 ayat 2), sekolah kita belum dapat didayagunakan untuk menjadi pusat kebudayaan. Pada umumnya, sekolah kita sampai sekarang baru dapat menjadi tempat untuk memperoleh pengetahuan yang umumnya untuk dihapal, bukan untuk digunakan sebagai wahana untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari-baik sebagai pribadi, anggota keluarga, pemimpin keluarga, anggota dan pemimpin masyarakat, maupun sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia-tetapi untuk lulus ujian nasional, (Soedijanto: 45).

Selain yang telah disebutkan di atas, Soedijarto juga mengemukakan bahwa pendidikan Nasional Indonesia masih sangat membutuhkan formulasi sumber daya Pendidikan dan anggaran pendidikan untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Untuk melengkapi penilaian Seodijarto terhadap permasalahan pendidikan di Indonesia, Muhammad Surya, dalam Fuad A. Hamied (2008: 84-97), juga mengemukakan pendapatnya tentang peran guru dalam mendukung pelaksanaan wajib belajar sembilan tahun. Menurutnya, guru sebagai garda terdepan pendidikan, namun demikian, guru yang diharapkan sebagai garda terdepan tersebut masih dilingkupi permasalahan, meliputi; kuantitas, kualitas dan distribusi; kesejahteraan; manajemen guru; penghargaan terhadap guru; pendidikan guru dan lain sebagainya.

Selain problem pendidikan yang telah disebutkan di atas, lebih jauh Surakhmad (2009), mengemukakan pandangannya, bahwa problem pendidikan yang amat besar yang terjadi sampai dengan saat ini adalah hilangnya salah satu landasan pendidikan yaitu filosofi pendidikan. Dalam sub tulisannya ia beri judul *Filosofi Pendidikan: Menemukan Kembali Landasan Yang Hilang*. Pada bagian pengantar ia menuliskan sebagai berikut:

Ada sebuah fenomena yang sering berlalu didepan mata, yang hampir-hampir tidak terdeteksi, yakni proses kejiwaan yang terjadi ketika pendidikan harus memilih antara menerapkan pendidikan tanpa menghiraukan landasan filosofinya, dengan memahami filosofi pendidikan sebagai pengetahuan, tetapi tanpa menghiraukan penerapannya. Memilih satu diantara keduanya-yang manapun-berarti memilih yang tidak benar. Secara hakiki, tidak ada aktivitas atau praktik pendidikan yang dapat berlangsung tanpa dasar filosofi, yang sedikitnya terkait dengan makna kehidupan dan nilai-nilai kemanusiaan. Pendidikan tanpa dasar filosofi yang jelas, bukan saja goyah tetapi juga berbahaya. Sebaliknya, tidak ada filosofi yang dapat mendalami problematik pendidikan tanpa menjiwai praktik pendidikan. Filosofi pendidikan yang tidak berkelajutan ke dalam penerapannya dalam kehidupan nyata, menjadi mubazir, dan tidak layak disebut filosofi pendidikan, (Surakhmad: 29-30).

Lebih jauh Surakhmad mengemukakan sedikitnya ada tiga fenomena yang perlu menjadi perhatian, karena menggambarkan mengapa manusia “berhenti”

menjadi makhluk berfilosofi, yaitu pertama; karena filosofi lahirnya terlalu awal, sehingga sering dianggap kuno; kedua, karena dunia semakin pragmatis; ketiga, karena perubahan semakin terakselerasi, pandangan bahwa yang kekal adalah perubahan, sehingga menganggap tidak berguna membicarakan sejumlah hal, termasuk pendidikan secara normatif.

Menurut Surakhmad visi pendidikan harus sejalan dengan visi tentang manusia dan kehidupan. Namun demikian ia mempertanyakan, dimanakah sekarang kita dapat menemukan filosofi pendidikan? Sukar! Filosofi pendidikan sudah semakin sering dilupakan. Diperkatakanpun jarang. Pengamatan ini terutama terfokus pada yang terjadi di Indonesia selama 30 tahun terakhir. Banyak alasan atau justifikasi yang dikemukakan oleh mereka yang menganggap bahwa filosofi pendidikan sudah tidak diperlukan, atau sekurang-kurangnya menganggap sudah tidak perlu dipersoalkan lagi. Walaupun demikian, tidak ada diantara alasan yang banyakit yang dapat mengingkari realitas bahwa setiap tingkah laku kependidikan adalah tingkah laku yang bertujuan, dan bahwa tiap tujuan bersumber dari pilihan, dan bahwa tiap pilihan adalah alternatif yang berdasarkan pandangan filosofis: pandangan filosofi pendidikan, (Surakhmad: 49-50).

Menurut Surakhmad, ketidakpahaman terhadap filosofi pendidikan, membuat filosofi pendidikan itu tersingkirkan di dalam persepsi banyak pendidik dewasa ini. Mereka pada umumnya berada dalam kategori pendidik yang terbenam dalam arus pendidikan 'kontemporer-praktis'. Misalnya mereka yang memiliki:

1. Pandangan problematik pendidikan tidak lagi terletak dalam aspek normatif, tetapi telah beralih dan kini terletak dalam aspek teknis.
2. Pandangan bahwa pendidikan harus kembali ke tugas utama, yakin mengajarkan baca tulis sapa kepada ilmu pengetahuan dasar dan keterampilan yang berguna untuk kemandirian
3. Pandangan bahwa pendidikan terutama bertujuan menyiapkan sumber tenaga manusia memasuki dunia kerja, yakni sebagai manusia pembangunan.
4. Pandangan bahwa pendidikan harus dikembangkan dan dikelola secara modern industri. (Surakhmad: 50-53).

## **Fenomena Pendidikan di Aceh**

Dalam tatanan sistem pendidikan, pada prinsipnya pendidikan di Aceh tidak terlepas dari sistem pendidikan nasional. Namun demikian secara konsep terdapat perbedaan yang cukup mendasar, antara sistem pendidikan nasional dengan cita-cita ideal pendidikan di Aceh.

Selain faktor historis dan budaya masyarakat Aceh yang cukup kuat memegang teguh syari'at Islam, juga faktor legalitas dari pemerintah Indonesia, yang menyatakan Daerah Aceh sebagai daerah berotonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2001, dan sebagai daerah istimewa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 1999. Kedua Undang-undang tersebut diperkuat dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.

Sebagai daerah istimewa yang telah diakui oleh pemerintah pusat karena perjuangannya dan nilai-nilai hakiki yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual, moral dan kemanusiaan, sehingga penyelenggaraan keistimewaan meliputi: penyelenggaraan kehidupan beragama; penyelenggaraan kehidupan adat; penyelenggaraan pendidikan dan; peran ulama dalam penetapan kebijakan pemerintah. (pasal 3 ayat 2, UU No. 44 tahun 1999).

Penyelenggaraan pendidikan di Aceh sudah sejak lama mendapat predikat istimewa, seiring dengan sebutan Aceh sebagai daerah istimewa, walaupun kemudian keistimewaan tersebut belum sepenuhnya menjadi kenyataan. Terdapat sejumlah upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pendidikan berdasarkan asas keistimewaan, antara lain melalui penetapan peraturan daerah (Qanun), nomor 23

tahun 2002 tentang penyelenggaraan pendidikan, dan peraturan daerah yang terbaru tentang penyelenggaraan pendidikan adalah qanun nomor 5 tahun 2008.

Melalui qanun pendidikan tersebut dapat dicermati kekhasan penyelenggaraan pendidikan di Aceh. Pada bab II menjelaskan dasar, fungsi, tujuan dan prinsip pendidikan.

Pasal 2 berbunyi, pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah pendidikan yang berdasarkan pada al-Qur'an dan Hadits, falsafah negara Pancasila, Undang-undang Dasar 1945 dan kebudayaan Aceh.

Pasal 3, berbunyi, Pendidikan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berfungsi untuk memantapkan iman dan taqwa kepada Allah Swt, mengembangkan kemampuan, ilmu dan amal saleh, dalam upaya meningkatkan mutu kehidupan sesuai dengan tuntunan ajaran Islam dan dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Pasal 4 berbunyi, Pendidikan Naggroe Aceh Darussalam bertujuan membina pribadi muslim seutuhnya, sesuai dengan fitrahnya, yaitu pribadi yang beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt, berakhlakul karimah, demokrasi, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia, berpengetahuan, berketerampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap dan mandiri, mampu menghadapi berbagai tantangan global, dan demi tanggung jawab kepada Allah Swt, masyarakat dan negara, (Qanun Provinsi NAD No. 23 tahun 2002: 8-9).

Konsep ideal tentang penyelenggaraan di Aceh sebagaimana disebutkan di atas, sampai dengan saat ini masih belum terwujud, hal yang demikian terjadi antara lain faktor internal penyelenggara pendidikan belum siap untuk mewujudkan proses pendidikan kearah tujuan sebagaimana yang disebutkan, kemudian kondisi sosial masyarakat yang lama didera konflik sosial dan konflik bersenjata membuat proses pendidikan sangat terganggu di Aceh. Selanjutnya peristiwa gempa besar dan tsunami 26 Desember 2004 telah mengakibatkan dunia pendidikan semakin terpuruk.

Rangkaian peristiwa kemanusiaan dan bencana alam telah membuat mata rantai sejarah kehidupan masyarakat dan pendidikan menjadi kelam. Untuk

memberdayakan dan mengangkat masyarakat dari keterpurukan kehidupan sosial dan pendidikan pemerintah beserta seluruh komponen masyarakat bersatu mengadakan rehabilitasi dan rekonstruksi termasuk lembaga pendidikan (sekolah).

Peran pendidikan (persekolahan) dalam pengembangan sumber daya manusia, dan penguatan budaya masyarakat sudah tidak dapat diragukan lagi. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan kebudayaan nasional merupakan bagian dari tujuan utama pendidikan, selain dari tujuan pendidikan nasional yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003.

Analisis sosiologis dan psikologis peran lembaga pendidikan formal ini menjelaskan optimisme masyarakat terhadap fungsi sekolah tersebut.

S. Nasution (1995: 14), menguraikan fungsi sekolah, yaitu: 1) menyiapkan anak untuk suatu pekerjaan, 2) memberikan keterampilan dasar, 3) membuka kesempatan memperbaiki nasib, 4) menyediakan tenaga pembangunan, 5) membantu memecahkan masalah-masalah sosial, 6) mentransmisi kebudayaan, 7) membentuk manusia yang sosial, 8) alat mentransformasikan kebudayaan. Dan fungsi lain menurutnya, sekolah juga dapat difungsikan sebagai tempat penitipan anak, atau tempat dimana dapat diperoleh kesempatan mencari jodoh.

Robert G. Owens (1995), menyebutkan dalam pandangan sosiologis dan psikologis bahwa tujuan persekolahan adalah; 1) prestasi akademik, 2) kebiasaan kerja yang efektif, 3) nilai kewarganegaraan, 4) perilaku sosial, 5) harga diri, 6) percaya diri. Untuk mencapai tujuan persekolahan tersebut, maka sasaran aktivitas

persekolahan adalah: 1) penghargaan guru terhadap pencapaian prestasi belajar, 2) hubungan antara pelajar dengan guru, 3) motivasi pelajar, 4) waktu yang dihabiskan untuk pengajaran dan pembelajaran, 5) hubungan antar pembelajar dengan individu teman sejawat. Untuk mencapai tujuan tersebut, ahli sosiologi dan pendidikan cenderung menekankan kepada: 1) bagaimana sekolah memimpin dan mengelola, 2) bagaimana murid dikelompokkan, 3) keterlibatan orang tua dan masyarakat, 4) cara pelajar dan guru bekerjasama, 5) cara keputusan dibuat di sekolah, (Owens, 1995: 18).

Hurlock (1986: 322), mengemukakan bahwa sekolah merupakan faktor penentu bagi perkembangan kepribadian anak, baik dalam cara berpikir, maupun dalam berperilaku. Sekolah berperan sebagai substitusi keluarga, dan substitusi orang tua. Dengan demikian, Ainscow (1991: 8), menyebutkan "*school as problem-solving organization-teacher as reflective practioners*", bahwa persekolahan merupakan tempat untuk menemukan penyelesaian atas masalah-masalah, dan para guru harus dapat memberikan bantuan dalam penyelesaian masalah tersebut.).

Hasubullah (2006: 46) mengemukakan pada dasarnya pendidikan di sekolah merupakan bagian dari pendidikan dalam keluarga, yang sekaligus juga merupakan lanjutan dari pendidikan dalam keluarga. disamping itu pendidikan disekolah adalah jembatan bagi anak yang menghubungkan kehidupan dalam keluarga dengan kehidupan dalam masyarakat kelak.

Adapun yang dimaksud dengan pendidikan sekolah disini adalah pendidikan yang diperoleh seseorang di sekolah secara teratur, sistematis,

bertingkat kelas dan dengan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat (mulai dari jenjang taman kanak-kanak sampai dengan perguruan tinggi)

Bagi bangsa-bangsa yang telah dapat memanfaatkan hasil pendidikan melalui sistem persekolahan, tetap optimis mengatakan bahwa sekolah dapat mencapai berbagai tujuan yang diinginkan (Shane, 2002: 36). Dan bahkan menurutnya paling tidak terdapat empat potensi dari signifikansi pendidikan terhadap dunia masa depan, yaitu:

Pendidikan melalui persekolahan secara potensial penting karena: 1. Pendidikan adalah suatu cara yang mapan untuk memperkenalkan sipelajar kepada keputusan sosial yang timbul; 2. Pendidikan dapat dipakai untuk menanggulangi masalah-masalah tertentu; 3. Pendidikan telah memperlihatkan kemampuan yang meningkat untuk menerima dan mengimplementasikan alternatif-alternatif baru; 4. Pendidikan barangkali merupakan cara yang terbaik yang dapat ditempuh masyarakat untuk membimbing perkembangan manusia sehingga pengamanan dari dalam berkembang pada setiap anak dan karena itu dia didorong untuk memberikan kontribusi pada kebudayaan masa depan.

Harapan idieal terhadap pendidikan persekolahan sabagaimana disebutkan di atas, dalam kenyataannya kerap terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam proses pendidikan di sekolah. Hal demikian dapat dilihat misalnya dari uraian-uraian yang menjelaskan terjadinya praktek pendidikan yang tidak sehat dalam sistem persekolahan. Irwin A. Hyman dan Pamela A. Snook (1999) menyebutnya *dangerous school*. Karena dalam lingkungan pendidikan tidak jarang terjadi kekerasan fisik dan tindakan asusila.

Proses Pendidikan (persekolahan) dalam kondisi kehidupan sosial masyarakat yang normal pun terkadang peran dan fungsinya tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, tentu dapat ketahui keadaan bagaimana proses persekolahan yang terdapat di daerah konflik, hampir dapat dipastikan bahwa proses pendidikan dipersekolahan tidak berjalan sesuai harapan. Kalaupun berjalan dengan baik, kemudian ada permasalahan bahwa pendidikan formal dalam menjalankan fungsinya tidak seimbang dalam mendidik kepribadian manusia secara utuh, stigma dan realitas selama ini pendidikan formal lebih memprioritaskan aspek akademis-kognitif.

Pendidikan persekolahan di Aceh diduga kuat tidak berjalan dengan baik, karena hampir setengah abad lamanya berada dalam kondisi konflik sosial dan konflik bersenjata. Dampak negatif konflik terhadap pendidikan sangat jelas terjadi, dan untuk memberikan gambaran singkat kondisi masyarakat dan pendidikan di Aceh, diuraikan dalam empat tahapan perubahan sosial dan pendidikan, yaitu kondisi sosial sebelum tsunami, pendidikan di Aceh sebelum tsunami, Kondisi sosial dan pendidikan di Aceh Sesudah Tsunami.

#### 1. Kondisi Sosial Aceh Sebelum Tsunami

Dokumen sejarah yang berkaitan dengan keberadaan Provinsi Aceh sebagai daerah istimewa, tidak mungkin dapat dilupakan begitu saja, terutama oleh masyarakat Aceh khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. secara resmi pemerintah Indonesia memberikan status istimewa tersebut kepada Aceh sejak tanggal 26 Mei 1959, (Ahmad Farhan Hamid, 2006: 4). Dan yang tidak mungkin dapat dipungkiri bahwa Aceh merupakan daerah yang didiami oleh

masyarakat yang sangat taat dalam menjalankan ajaran agama Islam, sehingga Aceh-pun dikenal dengan sebutan Serambi Mekkah.

Keistimewaan Aceh, sejak masa pemerintahan Orde Lama, meliputi tiga bidang yaitu keistimewaan dalam bidang penyelenggaraan agama Islam, penyelenggaraan budaya dan adat, serta penyelenggaraan pendidikan, sejak tahun 1999 keistimewaan Aceh itu dilengkapi dengan peran ulama sebagai mitra yang memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam pembangunan Aceh, baik diminta maupun tidak diminta guna terselenggaranya pemerintahan yang bersih di Aceh.

Secara ekonomi, masyarakat Aceh selalu berada dalam kondisi yang sangat tidak menguntungkan, karena pengaruh faktor politik yang dibangun oleh pemerintah Indonesia sejak lama, telah memusatkan kegiatan Ekonomi di kota Medan Sumatera Utara, perusahaan yang berskala Nasional, hampir semuanya dikendalikan dari luar Aceh. Eksploitasi sumber daya alam Aceh tidak berkorelasi dengan pembangunan infrastruktur di Aceh (M. Isa Sulaiman, 2000: 5). Dengan demikian hasil bumi Aceh kurang dimanfaatkan untuk membangun kehidupan sosial masyarakat Aceh.

Kalau saja Aceh diberi kesempatan untuk lebih banyak terlibat dalam kegiatan ekonomi, maka masyarakat Aceh dapat dipastikan lebih makmur. Karena aset migas dan non-migas sebagai sumber ekonomi cukup banyak tersebar di Aceh, ladang minyak, gas, pupuk, semen, perkebunan cengkeh, kelapa sawit, kopi, penangkapan ikan, ada di Aceh, tapi sekali lagi, masyarakat Aceh hanya sebagai penonton di tanah tumpah darahnya sendiri.

Dalam kondisi yang demikian, masyarakat Aceh tetap menunjukkan eksistensi sebagai masyarakat yang beragama dan berbudaya, walaupun ada penentangan terhadap kebijakan pemerintah pusat, masyarakat Aceh tetap menunjukkan sikap santunnya dalam berbangsa dan bernegara.

Akumulasi kekecewaan terhadap kebijakan pemerintah pusat yang sentralistik, pada waktu itu membuat masyarakat Aceh bergolak, pergolakan sosial, kemudian diikuti dengan konflik bersenjata. Propaganda terhadap kemerdekaan Aceh dikumandangkan oleh putra-putri Aceh baik yang sudah berada di luar negeri maupun yang masih ada di dalam negeri. Inilah yang kemudian melahirkan gerakan Aceh Merdeka (AM). Sejak tahun 1978, gerakan ini memperkuat propagandanya ditengah-tengah masyarakat Aceh, sembari berupaya memperoleh dukungan dari dunia Internasional. Penjelasan lebih rinci berkaitan dengan Gerakan Aceh Merdeka dapat dibaca dalam, (Al Chaidar: 2000, Isa Sulaiman: 2000).

Pemerintah pusat meredam gerakan ini, dengan memberlakukan Aceh sebagai Daerah Darurat Meliter sejak tahun 1989, kebijakan represif yang diambil oleh pemerintah pusat, membuat sebagian masyarakat Aceh bergerak bagai 'api dalam sekam', tokoh gerakan Aceh Merdeka yang ada di Aceh mampu menarik simpati masyarakat, dengan menunjukkan situasi yang penuh gejolak, fakta membuktikan pada masa ini banyak harta benda masyarakat yang dirampas, banyak perempuan menjadi jadi janda, dan banyak anak-anak menjadi yatim. Tentang masyarakat yang menjadi korban kekerasan di Aceh pada masa darurat meliter diuraikan oleh Al-Chaidar (1998).

Selama sepuluh tahun Aceh dijadikan sebagai Daerah Darurat Militer, ternyata tidak mampu meredam perlawanan terhadap pemerintah Indonesia. Sekitar tahun 1998, status Darurat Militer di cabut oleh pemerintah pusat, seiring dengan semangat reformasi yang terjadi di Indonesia. Pemerintahan pada era reformasi juga, menurut masyarakat Aceh kurang serius menangani persoalan konflik yang telah lama mendera masyarakat Aceh, walaupun ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengani masalah tersebut. Ketidak puasan sebageian masyarakat ini terbukti, tidak lebih dari setengah tahun kemudian, kekuatan Gerakan Aceh Merdeka menunjukkan aksinya, kontak senjata setiap hari terjadi diwilyah yang berbeda antara pihak RI dan GAM, peristiwa kontak sejata ini sepertinya sudah menjadi 'hiburan yang menakutkan' bagi masyarkat Aceh, namun terus terjadi. Puncak gerakan bersejata ini mulai terjadi sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2004, sebagai akibatnya tentu dapat diketahui, kehidupan sosial masyarakat Aceh semakin terpuruk, kegiatan ekonomi lumpuh.

Selain masyarakat sipil yang tidak terlibat secara langsung baik dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) maupun dengan pihak pemerintah Indonesia banyak yang menjadi korban korban, dan bahkan perempuan, anak-anak, apalgi laki-laki dewasa. Selain masyarakat sipil yang menjadi korban, juga terdapat sejumlah tokoh yang harus mengakhiri hidupnya sebagai akibat dari konflik tersebut. Sebut saja beberapa nama, diantaranya T. Johan tokoh Aceh yang dikenal cukup dekat dengan pemerintah pusat, karena dia sebagai ketua Golkar pada waktu itu, yang lainnya, tokoh intelektual Aceh yang menjadi korban adalah Rektor Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Prof. Dr. Syafwan

Idris, dan Rektor Universitas Syiah Kuala Prof. DR. Dayan Dawood, meninggal karena ditembak oleh orang yang tak dikenal pada 2000-2001.

Selain konflik vertikal antar kelompok masyarakat Aceh dengan pemerintah Republik Indonesia yang sudah berjalan cukup lama, juga terjadi konflik sosial horizontal, yaitu terjadinya berbagai macam konflik yang dipicu oleh latar belakang etnis, antara masyarakat aceh dengan masyarakat pendatang, awalnya terdapat oknum yang berperilaku tidak manusiawi terhadap masyarakat pendatang, terutama masyarakat yang datang dari pulau jawa. Konflik ini mengakibatkan banyak masyarakat non-etnis Aceh harus meninggalkan daerah Aceh. Tetapi banyak juga yang bertahan dan memperlakukan perlawanan terhadap oknum yang mencoba untuk mengusir mereka dari bumi Aceh. Konflik ini juga telah mengakibatkan kehidupan masyarakat tidak tenang dan tidak nyaman.

Kondisi sosial yang digambarkan secara gamblang di atas, tentu saja sangat berpengaruh terhadap dunia pendidikan di Aceh, pengaruhnya bukan hanya terhadap institusi pendidikan, tetapi juga berpengaruh terhadap proses pendidikan itu sendiri. Selanjutnya disajikan potret pendidikan sebelum terjadinya peristiwa gempa dan tsunami di Aceh pada 26 desember tahun 2004.

## 2. Pendidikan di Aceh Sebelum Tsunami

Kondisi sosial masyarakat Aceh, sejak Indonesia merdeka dapat dikatakan cukup bersahaja, walaupun hari-hari yang dilalui oleh masyarakat Aceh dari generasi ke generasi, hampir tidak pernah sunyi dari konflik sosial dan konflik bersejata. Selain faktor situasi dan kondisi yang tidak mendukung masyarakat

Aceh untuk berkembang, pada sisi lain, ternyata modernisasi yang bergulir juga berpengaruh terhadap pendidikan di Aceh. Modernisasi pendidikan di Aceh dapat dicermati dari pergeseran yang nyata terjadi, selain dari Sekolah, Madrasah dan pendidikan dayah. Pendidikan dayah mengalami transformasi sehingga dapat diklasifikasikan menjadi dua model yaitu dayah salafiah-tradisional, dan dayah terpadu-modern.

Pada masa-masa konflik sosial dan konflik bersenjata, pendidikan di Aceh walaupun berproses dalam melaksanakan pengajaran, akan tetapi dapat diduga bahwa pelaksanaannya tidak sebagaimana yang seharusnya dan tidak sesuai dengan harapan. Pendidikan berjalan secara baik hanya pada lembaga pendidikan-sekolah yang berada di pusat kota, atau tidak terlalu jauh dari pusat kota, sedang sekolah-sekolah yang jauh dari pusat kota, lebih-lebih lagi di daerah yang paling parah dilanda konflik sekolah hampir dapat dikatakan lumpuh.

Sekolah-sekolah yang berada jauh dari kota dan di daerah marginal, selain peserta didiknya berkurang karena eksodus, atau pindah ke daerah yang lebih aman, juga karena komponen pendidikan juga sudah kurang mendukung, seperti banyak guru yang ikut pindah karena takut berada di daerah konflik, ruang belajar yang kurang terawat dan lain sebagainya.

Perpindahan tenaga pendidikan dan peserta didik ke sekolah-sekolah yang ada di kota, berakibat pada proses penyelenggaraan pendidikan hanya terjadi secara intens di kota, akibat yang ditimbulkan antara lain ketidak seimbangan-ruang kelas tidak mencukup, rasio jumlah peserta didik dalam satu kelas tidak seimbangan dan lain sebagainya. Singkat kata, proses pendidikan menjadi tidak

seimbang antara sekolah-sekolah yang ada di kota dengan sekolah-sekolah yang ada di perkampungan yang jauh dari kota.

Akibat konflik terhadap pendidikan juga dapat dicermati dari aspek psikologis peserta didik. Peserta didik banyak yang mengalami ketakutan, karena setiap hari mereka mendengar dan bahkan menyaksikan peristiwa-peristiwa yang belum pantas untuk didengar atau disaksikannya, misalnya pembunuhan, atau menyaksikan keluarganya yang ketakutan, dan lain-lain sebagainya. Dengan kata lain, tugas perkembangan anak-peserta didik menjadi tidak normal karena konflik.

Walaupun konflik sedang melanda Aceh, secara politis sejak tahun 1999 Aceh memperoleh otonomi khusus, dengan demikian mendapat anggaran dana alokasi umum serta dana alokasi khusus, sehingga anggaran untuk pendidikan di Aceh cukup banyak, tetapi anggaran yang cukup banyak ini juga, sampai dengan saat ini masih belum dapat mengangkat kualitas pendidikan di Aceh. Selain untuk dana operasional untuk pendidikan tersebut juga banyak tersedot untuk memperbaiki gedung yang rusak dan membangun gedung baru yang musnah terbakar akibat konflik.

Konflik bersejata di di Aceh telah berimbas pada lembaga persekolahan, pada tahun 2003, tepatnya pada malam setelah dikeluarkan Kepres untuk pemberlakuan darurat militer di Aceh, hampir 500 gedung sekolah yang dibakar. Adapun rincian sekolah yang dibakar Banda Aceh 1 unit, Aceh besar 28 unit, Pidie 185 unit, Bireuen 126 unit, Aceh Taminag 6 unit, Aceh Jaya 15 unit, Aceh Timur 25 unit, Aceh Utara 1 unit dan Kota Langsa 1 unit. Dari jumlah tersebut

hampir 80 % gedung sekolah yang dibakar adalah gedung Sekolah Dasar, (Anton Widyanto, 2007: 159).

Konflik, selain dari berakibat pada musnahnya sejumlah sarana pendidikan (gedung sekolah) dan gangguan psikologis peserta didik, akibat konflik yang lainnya juga terjadi pada bidang penyajian materi pelajaran. Materi dan mata pelajaran yang berbau patriotisme dan nasionalisme, seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, sudah kurang dibelajarkan kepada siswa-siswi di sekolah, terutama sekolah-sekolah yang berada di daerah konflik yang paling parah, lagu-lagu nasional, serta upacara bendera sudah sangat asing dari kegiatan siswa di sekolah. Singkat kata, sekolah sudah kurang berperan dalam menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan persatuan berbingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Indonesia bersama pemerintahan provinsi Aceh, terus berupaya untuk mewujudkan pendidikan yang baik bagi masyarakat Aceh, selain dari bantuan operasional dan pembangunan gedung sekolah, pemerintahan Aceh juga cukup serius dalam upaya memberdayakan pendidikan, hal ini dibuktikan dari disahkannya Peraturan Daerah nomor 23 Tahun 2002, tentang Sistem Pendidikan di Aceh.

Diharapkan melalui peraturan tentang pendidikan tersebut, pendidikan di Aceh dapat bangkit melalui sejumlah inovasi, baik kelembagaan maupun proses pembelajaran. Harapan tersebut sedang dalam proses pencapaian, ditengah-tengah proses yang sedang berjalan untuk memperbaiki pendidikan, masyarakat Aceh kembali mendapatkan musibah berupa gempa dan tsunami. Kondisi masyarakat

semakin terpuruk, lembaga pendidikan banyak, yang hancur, anak-anak usia sekolah banyak yang kehilangan orang tua. Kehidupan sosial, ekonomi dan pendidikan di Aceh kembali ke keadaan yang sangat memprihatinkan.

### 3. Kondisi sosial dan pendidikan di Aceh Sesudah Tsunami

Pada tanggal 26 Desember 2004, hari Minggu pagi, masyarakat Aceh mendapatkan cobaan yang cukup dahsyat, yaitu gempa bumi 9,1 skala reक्टर dan tsunami. Selama berpuluh tahun berada dalam konflik, yang membuat masyarakat Aceh terpuruk dalam berbagai bidang kehidupan. Peristiwa gempa bumi dan tsunami semakin memperparah keadaan, walaupun kemudian peristiwa ini juga membawa hikmah tersendiri.

Gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh merupakan musibah Nasional bagi bangsa Indonesia, sehingga masyarakat dan bangsa Indonesia, dan dunia internasional bersimpati sekaligus memberikan bantuan material dan moral bagi masyarakat Indonesia yang ada di Aceh.

Bantuan datang ke Aceh dari sejumlah negara dalam berbagai macam bentuknya, ada yang bersifat bantuan langsung ada pula yang terprogram melalui pemerintah Indonesia. Untuk kembali membangun Aceh dalam berbagai sektor kehidupan pemerintah Indonesia membentuk suatu badan yang disebut Badan Rehabilitasi dan rekonstruksi (BRR) NAD-NIAS, yang berpusat di kota banda Aceh.

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh, bersama masyarakat membuat rancangan pembangunan Aceh pasca gempa dan tsunami, selain bangunan fisik,

baik rumah penduduk maupun sarana umum menjadi prioritas utama, tentu saja sembari membangun sektor sosial, ekonomi, pendidikan dan yang lain-lainya.

Fasilitas dan komponen pendidikan cukup banyak hancur akibat gempa dan tsunami, oleh karena itu Pemerintah Indonesia, negara-negara yang memberikan bantuan, lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam dan luar negeri serta didukung sepenuhnya oleh masyarakat kembali berupaya untuk menata kehidupan sosial dan pendidikan di Aceh.

Salain membangun gedung sekolah yang sudah hancur, berkaitan dengan pendidikan ini, pada awalnya banyak relawan yang menjadi guru di tempat-tempat darurat, sembari memberikan pelatihan terhadap sebagian guru.

Selain sekolah pemerintah, dalam setiap satuan pendidikannya, juga pihak swasta banyak yang membangun sekolah, termasuk dalam bentuk home schooling, terutama disediakan untuk anak-anak usia pendidikan dasar.

Memperhatikan kondisi yang demikian itu, pada satu sisi masyarakat Aceh sangat bersyukur karena banyak sekali yang menaruh perhatian terhadap pendidikan, akan tetapi pada sisi lain, pendidikan yang tumbuh setelah tsunami, harus benar-benar menjadi perhatian, terutama dari segi tujuan pendidikan yang ingin dicapai oleh sejumlah sekolah swasta dan home schooling tersebut. Bila ini dicermati, maka bisa saja, masyarakat Aceh semakin terkikis nilai-nilai budayanya, termasuk rasa persatuan dan kesatuan dibawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sebagaimana yang telah disebutkan di atas, gempa dan tsunami di Aceh melengkapi penderitaan masyarakat yang semakin terpuruk, tetapi dibalik itu

terdapat hikmah tersendiri, dan harus disyukuri oleh masyarakat Indonesia terutama yang berada di Aceh.

Hikmah yang pertama dari peristiwa gempa dan tsunami adalah, banyaknya bantuan dari pemerintah dan masyarakat Indonesia, serta bantuan negara dan masyarakat asing, baik dalam bentuk moril maupun materil. Karena peristiwa kemanusiaan ini, Aceh menjadi terbuka bagi seluruh masyarakat Indonesia dan warga negara asing yang ingin menyalurkan bantuannya kepada korban gempa dan tsunami. Lembaga swadaya masyarakat dalam dan luar negeri banyak yang tinggal di Aceh, bahkan ada yang tinggal sampai dengan saat ini di Aceh.

Hikmah yang kedua dari peristiwa gempa dan tsunami adalah terbukanya kesempatan untuk berdialog antara pemerintah Republik Indonesia dengan gerakan Aceh Merdeka, dan dialog tersebut memperoleh hasil berupa ditandatanganinya oleh kedua belah pihak *Memorandum of Understanding* (MoU) di Helsinki Finlandia pada tanggal 15 Agustus 2005.

Dua hikmah yang telah disebutkan diatas, menjadi titik pijak bagi masyarakat Aceh untuk bangkit kembali dari keterpurukan. Melalui bantuan yang datang dari dalam dan luar negeri, masyarakat Aceh kembali menata kehidupan, dalam suasana damai, demokratis dan terbuka, sepanjang tidak mengusik masalah agama dan budaya masyarakat Aceh.

Kehidupan sosial yang terjadi di Aceh pasca tsunami, nampaknya melahirkan masalah tersendiri bagi masyarakat Aceh, bantuan yang diberikan hampir tanpa pertimbangan ternyata telah membuat sebagian masyarakat Aceh

‘manja’ dan ingin terus menikmati bantuan itu, ketika bantuan mulai dibatasi dan terbatas, muncul gejolak sosial, seperti sulitnya lapangan kerja, upah rendah, penghasilan rendah dan lain sebagainya.

Pada sisi lain reintegrasi anggota Gerakan Aceh Merdeka, juga memunculkan fenomena sosial yang harus ditangani secara serius oleh pemerintah, dan stakeholder yang ada di Aceh, karena proses reintegrasi ini membutuhkan biaya yang cukup banyak, sebagai konsekwensi dari MoU Hilsinki.

Semangat untuk mempertahankan perdamaian dan kedamaian di Aceh, telah mendorong masyarakat berbenah diri dan menata masa depan diri dan generasinya untuk dapat tampil menjadi lebih baik.

Kehidupan sosial dan pendidikan, laksana dua sisi mata uang, yang bila dibuang salah satunya maka akan menjadi tidak bermakna. Oleh karena itu rekonstruksi dan rehabilitasi dalam bidang pendidikan mendapat perhatian yang cukup serius. Puluhan gedung sekolah baru dibangun, lengkap dengan fasilitas pendukungnya oleh pemerintah Indonesia, bantuan pemerintah negara asing, maupun lembaga swadaya masyarakat dalam dan luar negeri. Salah satu lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang mendirikan sekolah di Aceh adalah Yayasan Sukma.

Dengan demikian selain sekolah negeri (sekolah milik pemerintah), pasca peristiwa gempa dan tsunami di Aceh terdapat sejumlah sekolah swasta. Sebagai lembaga pendidikan, baik negeri maupu swasta, dapat dipahami memiliki tujuan yang bersamaan, namun demikian terdapat hal yang penting untuk diteliti menyangkut permasalahan model kontekstualisasi filosofi pendidikan yang

dikembangkan oleh kedua bentuk sekolah tersebut. Mengingat bahwa masyarakat Aceh memiliki karakteristik pendidikan lokal disamping karakteristik pendidikan nasional sebagai akibat dari status otonomi khusus yang dimiliki oleh daerah Aceh.

Sehubungan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka formulasi permasalahan penelitian ini adalah seperti apakah Kontekstualisasi filosofi Pendidikan yang diterapkan dalam pendidikan di Jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) dalam rangka membentuk anak sebagai generasi muda yang cerdas sebagai bagian mencerdaskan kehidupan bangsa termasuk sumber daya manusia berkualitas bervisi nasional di era global.

## **B. Rumusan Masalah**

Untuk menjabarkan permasalahan utama penelitian sebagaimana yang telah disebutkan di atas, perlu diajukan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Mengapa visi penting bagi penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan? Dan bagaimanakah visi pendidikan SMP Sekolah Sukma Bangsa dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri I Bireuen?.
2. Apakah pendidikan sudah diterapkan sesuai dengan visi yang telah ditetapkan pada kedua sekolah itu?.
3. Bagaimanakah tujuan pendidikan yang dirumuskan pada SMP Sekolah Sukma Bangsa dan SMPN I Bireuen dalam mewujudkan visi?.

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini terdiri atas tujuan umum dan tujuan khusus. Berdasar masalah penelitian sebagaimana yang telah disebutkan di atas, maka tujuan umum penelitian ini adalah untuk melakukan identifikasi dan rekonstruksi terhadap pengembangan model kontekstualisasi filosofi pendidikan dalam sistem pendidikan persekolahan.

Adapun sebagai tujuan khusus penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan visi pendidikan yang dikembangkan oleh Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekolah Sukma Bangsa di Bireuen dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) I Bireuen.
2. Untuk menganalisis penerapan visi dalam proses pendidikan pada SMP Sukma Bangsa dan SMPN I Bireuen.
3. Untuk menganalisis bentuk tujuan pendidikan pada SMP Sukma Bangsa dan SMPN I Bireuen.

### **D. Prosedur Penelitian**

Memperhatikan fokus dan tujuan penelitian, maka penelitian ini dapat disebut sebagai penelitian kualitatif. Sebagai ciri umum penelitian kualitatif adalah peneliti terlibat secara langsung dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah penelitian.

Memperhatikan fokus masalah serta tujuan penelitian ini, maka penelitian ini juga akan menggunakan beberapa pendekatan, pendekatan filosofis (filsafat Pendidikan), dan pendekatan ilmiah dalam bidang pendidikan, (Manajemen

Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah). Pendekatan-pendekatan ini digunakan sebagai pendukung analisa data empiris maupun teoritis konseptual.

Selain yang telah disebutkan di atas, penelitian kualitatif juga ditandai dengan cara mengumpulkan dari sumber data tersebut. Sumber data penelitian ini dari responden yang terdapat pada lokasi penelitian. Adapun data yang diperlukan untuk menjawab permasalahan penelitian diperoleh melalui: wawanara, pengamatan langsung, dan telaah dokumentasi.

Data yang telah diinventarisasi, selanjutnya dilakukan evaluasi kritis, atau dengan kata lain disebut reduksi data. Setelah melakukan evaluasi kritis, selanjutnya dilakukan sintesis. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah metode hermeneutika dan uraian data secara deskriptif analitis.

#### **E. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di lembaga pendidikan formal, yaitu Sekolah Sukma Bangsa di Bireuen Provinsi Aceh. Sekolah ini didirikan oleh Yayasan Sukma Bangsa yang berkantor pusat di Jakarta, jalan R.P. Soeroso no. 44-46 Gondangdia Lama, Jakarta 10350, telephone (021) 319 22515 (huntinng) fax (021) 3140980. Sedang Sekolah Sukma Bangsa di Bireuen beralamat jalan. Medan - Banda Aceh Desa Cot Keutapang Kecamatan Jeumpa Bireuen, Aceh 24251 Indonesia. Fokus penelitian adalah visi Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekolah Sukma Bangsa.

Sebagai perbandingan model visi pendidikan pada Sekolah Sukma Bangsa yang dijadikan sebagai fokus penelitian diambil satu sekolah Negeri yang

setingkat yaitu Sekolah Menengah Pertama (SMPN) I Bireuen, alamat jalan Laksamana Hayati, Kota Bireuen. Perbandingan ini dilakukan untuk menjelaskan model kontekstualisasi filosofi pendidikan melalui visi pendidikan yang dikembangkan oleh sekolah swasta dan sekolah negeri.

Alasan pemilihan lokasi penelitian adalah bahwa kehidupan sosial masyarakat Bireuen termasuk daerah yang terparah dilanda konflik bersenjata dan dampak tsunami yang terjadi tahun 2004 silam. Namun demikian pembangunan dalam bidang pendidikan menjadi salah satu aspek yang sangat diperhatikan. Hal ini ditandai dengan terdapatnya sejumlah pendidikan Dasar yang melayani masyarakat wajib belajar sembilan tahun. Sekolah Sukma Bangsa yang dibangun pasca tsunami diperkirakan sebagai model baru penyelenggaraan pendidikan di Bireuen. Sementara sebelumnya telah ada SMPN I Bireuen yang divavoritkan oleh masyarakat Bireuen.